

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Juneadi Karso, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tonggak Awal Penegakan Hukum Di Indonesia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
- Adib Hermawan, dkk., *Asta Cita Dan Program-Program Bidang Kesejahteraan Sosial: Pilar Strategis Mewujudkan Indonesia Emas 2045*, Jakarta: Badan Keahlian DPR RI, 2025.
- Ahmad Musadad dan Ahmad Agus Ramdlany, *Pengantar Ilmu Negara*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Amelia Cahyadini, *Hukum Pengawasan*, Bandung: Remaja Rosdakarya PT, 2023.
- Amin Fakhry, dkk., *Ilmu Perundang-Undangan*, Carenang: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Gerald Elisa Munthe, *Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
- Hasyim Asy'ari, *Dinamika Negara Hukum: Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta, 2019.
- Irma Fitriana Ulfah, dkk., *Kajian Tentang Parlemen*, Malang: UB Press, 2017.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratiche Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: KOMPAS, 2002.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, *Gender Dan Inferioritas Perempuan Praktif Kritik Sastra Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020.

Jurnal

Aan Junaedi dan Muhammad Jarnawansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 11, 2025.

Ahmad Sahal Alamsyah, "Penguatan Peran Badan Legislasi DPR RI Dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)", Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Asna Azizia Nikmah dan Elisabeth Septina Puspoayu, "Dekonstruksi Pasal-Pasal Kontra Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1, 2024.

Dwi Astuti Utami, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Agung Provinsi Lampung", *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 9, 2025.

Fariza Rachma Maulida, "Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Urgensi Dan Dinamika", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Fitha Lutvia Nitha Ayun, dkk., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1, 2024.

I Nengah Scopio Noviaman dan Slamet Haryadi, "Analisis Yuridis Mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS: Studi Di Reskrim Polsek Rumbia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024*, Jakarta, 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA)*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, 2025.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Kekerasan Seksual Menjadi Kasus yang Paling Banyak Dilaporkan*, Jakarta, 2024.

Meri Yantika dan Padrisan Jamba, “Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Muchlisin, “Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia”, *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Nurfadilla, “Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Skripsi, Palopo: IAIN Palopo, 2023.

Prianter Jaya Hari dan Latifah Marfuatul, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Putu Eva Ditayani Antari, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Salma Amelinda Iskandar, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Upaya Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya?”, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, 2023.

Siti R.A. Desyana, dkk., “Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Laporan Penelitian, Jakarta, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Website

Admin Bulelengkab, “Komisi VIII DPR RI Tinjau SMAN Dan SMKN Bali Mandara, Soroti Isu Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan”, <https://bulelengkab.go.id>, diakses pada 14 Januari 2026.

Anita Permata Dewi, “Efisiensi, Anggaran KemenPPPA Turun 48,86 Persen”, Antaranews: <https://antaranews.com>, diakses pada 10 Januari 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat, “Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XIII DPR RI Dengan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia”, Jakarta: <https://dpr.go.id>, diakses pada 20 Januari 2026.

E-Media DPR, “Setujui Anggaran 2025 Rp300,65 Miliar, Komisi VIII Apresiasi Kemen-PPPA Peroleh WTP Sejak 2017”, <https://dpr.go.id>, diakses pada 6 Januari 2026.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Pengesahan PP No. 27/2024 Tentang Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban TPKS”, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 5 Januari 2026.

Komisi VIII DPR RI, “Laporan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Ke Provinsi Jawa Tengah Masa Reses II Tahun Sidang 2023 - 2024”, Semarang, 2023.

Ni Nyoman Wira Widyanti, “Mengapa Anggaran Perlindungan Anak Harus Ditambah? Ini Penjelasan”, Kompas: <https://kompas.com>, diakses pada 16 Desember 2025.

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, “Menanti Realisasi Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://ombudsman.go.id>, 2025.

Sali Susiana, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa”, Isu Sepekan: <https://berkas.dpr.go.id>, 2024.

Salsa, “Komisi III Gelar RDPU Untuk Bahas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Surakarta”, Sindikat Post: <https://www.sindikatpost.com>, diakses pada 14 Maret 2026.

Sekretariat Jenderal DPR RI, “Tentang DPR: Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, <https://dpr.go.id>, 2025.

SintasPuan dan Titian Perempuan, “Data Kasus Kekerasan Seksual Sepanjang Tahun 2023”, diakses melalui <https://detik.com> pada 20 Januari 2026.

Tim Waktu Lampung 02, “Kasus Siswi SMP Di Lampung Utara Yang Digilir 10 Pria Disinggung Komisi III DPR RI”, <https://waktulampung.id>, diakses pada 16 Januari 2026.

TVR Parlemen, “Siaran Langsung Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA Mengenai Pelaksanaan UU TPKS”, YouTube, 5 September 2023, <https://www.youtube.com/@TVRParlemenDPRRI>.

TVR Parlemen, “Siaran Langsung Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XIII DPR RI dengan Komnas Perempuan”, YouTube, 23 Januari 2025, <https://www.youtube.com/@TVRParlemenDPRRI>.

WAWANCARA

Anton Syafruni, S.IP., M.IP. (Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI), Wawancara Pribadi, Jakarta: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, 19 Januari 2026.

Lisbet, S.IP., M.Si. (Analis Legislatif Ahli Madya Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI), Wawancara Pribadi, Jakarta, 2026.

Muhammad Nasir, ST., M.Si. (Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi VIII DPR RI), Wawancara Pribadi, Jakarta: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, 19 Januari 2026.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si. (Analis Legislatif Ahli Utama Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI), Wawancara Pribadi, Jakarta: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, 19 Januari 2026.